

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Konsep Tentang Kesejahteraan Sosial

Menurut (Suharto,2017), kesejahteraan mengandung 4 makna, diantaranya kondisi sejahtera, pelayanan sosial, tunjangan sosial dan, dan proses atau usaha terencana. Oleh karena itu, seorang individu, kelompok, maupun masyarakat dapat dikatakan sejahtera ketika kebutuhan mereka terpenuhi secara optimal. Agar masyarakat, keluarga dan kelompok dapat hidup dengan taraf hidup yang baik, maka harus dicapai taraf hidup yang layak. Namun, jika kehidupan yang mereka berikan tidak dapat berjalan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka, kehidupan mereka akan menghadapi masalah sosial.

1.1.1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan dimana seseorang dapat berfungsi dengan baik di dalam lingkungan sosialnya dan merupakan suatu kondisi dimana orang tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan mampu menjalin relasi dengan baik antar sesama. Seseorang dapat dikatakan sejahtera apabila ia jauh dari perbuatan yang membuat hidupnya menjadi menderita. Definisi kesejahteraan sosial menurut (Fahrudin, 2018:9) yaitu:

Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisir dari pelayanan dan lembaga sosial yang dirancang untuk mendorong individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan hubungan pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan potensi mereka

sepenuhnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan masyarakat dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Kesejahteraan sosial adalah penyelenggaraan kehidupan dan kehidupan sosial, baik materil maupun spiritual, yang memungkinkan upaya setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial yang sebaik-baiknya diri, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan hak asasi manusia dan tanggung jawab manusia menurut Pancasila (UU No. 6 Tahun 1974, Pasal 2 (1)).

1.1.2. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Tujuan utama dari kesejahteraan sosial adalah tercapainya kondisi sejahtera yang bisa diasumsikan ke dalam terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat seperti sandang, pangan, dan papan yang menjadi kebutuhan minimal masyarakat, serta bisa menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya. Kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial-ekonomi, menghindari terjadinya konsekuensi konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2018:10) bahwa kesejahteraan sosial mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Tercapainya kehidupan yang sejahtera, dalam arti tercapainya taraf hidup dasar seperti sandang, pangan dan papan, gizi, kesehatan, dan hubungan sosial yang selaras dengan lingkungan.

2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik terutama dengan masyarakat disekitarnya, bagaimana menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Dilihat dari tujuan diatas, ada tujuan lain yang disebutkan oleh (Fahrudin 2018:10) menyajikan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan sistem, pengawasan sistem dan perubahan sistem.

- a. Pemeliharaan Sistem

Pelestarian keseimbangan atau kelangsungan eksistensi nilai dan norma sosial serta aturan-aturan sosial dalam masyarakat, termasuk masalah yang berkaitan dengan pendefinisian makna dan tujuan hidup; motivasi untuk kelangsungan hidup individu dan kelompok.

- b. Pengawasan Sistem

Mengambil Tindakan efektif terhadap perilaku yang tidak pantas atau perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai sosial. Upaya kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dengan memperkuat fungsi pemeliharaan sebagai kompensasi (re)sosialisasi, ,meningkatkan kesempatan bagi kelompok masyarakat yang berperilaku menyimpang hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengendalian diri dengan menghilangkan penyebab masalah yang sebenarnya.

- c. Perubahan Sistem

Melakukan perubahan untuk mengembangkan sistem yang lebih efisien bagi anggota masyarakat. Dalam implementasi perubahan tersebut, sistem kesejahteraan merupakan alat untuk menghilangkan hambatan partisipasi penuh

dan adil dari anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan berbagi sumber daya secara lebih tepat dan setara; dan untuk penggunaan wajar struktur kenyamanan yang tersedia.

1.1.3. Fungsi-Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fahrudin, 2014 memberikan pandangan tentang apa yang menjadi fungsi dari kesejahteraan sosial, fungsi- fungsi tersebut antara lain:

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

3. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

Fungsi-fungsi tersebut berusaha dicapai untuk mengurangi tekanan dan mencegah munculnya masalah sosial baru. Secara kompleks fungsi-fungsi kesejahteraan sosial masing-masing fungsinya memiliki fokus tersendiri. Pada fungsi pencegahan ditujukan untuk memperkuat setiap orang untuk terhindar dari masalah baru. Fungsi penyembuhan ditujukan untuk pemulihan bagi setiap orang pada masalah kondisi pribadi agar berfungsi kembali. Pada fungsi pengembangan ditujukan untuk memberikan atau membantu pada proses pengembangan sumber daya sosial masyarakat. Pada fungsi penunjang untuk membantu mencapai sektor pelayanan sosial lainnya.

Fungsi-fungsi tersebut menggambarkan bagaimana kesejahteraan sosial bekerja. Kesejahteraan sosial juga berbicara tentang bagaimana suatu sistem berjalan sebagaimana fungsinya.

1.2.Konsep Tentang Pekerjaan Sosial

Menurut (Suharto, 2017) pekerjaan sosial merupakan aktivitas professional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan.

1.2.1. Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial disiplin luas yang mencakup banyak modalitas dan metodologi. Pekerjaan sosial mencakup beberapa hal mulai dari misi penyelamatan

kemanusiaan untuk membantu keluarga mendapatkan akses bantuan pemerintah , untuk konseling orang-orang yang hampir meninggal dan mengalami krisis kehidupan untuk pengembangan kapasitas dan sumber-sumber sosial. Satu hal yang dimiliki oleh pekerjaan sosial yang memiliki ruang lingkup luas ini adalah pekerjaan sosial berusaha memperbaiki kehidupan di tingkat individu, keluarga, kelompok, komunitas atau masyarakat. Pekerjaan sosial adalah praktik profesional yang dalam tindakan dan pelayanannya dilakukan oleh orang yang mendapatkan Pendidikan khusus dan secara formal memiliki izin dan kewenangan untuk melaksanakan tugasnya.

1.2.2. Tujuan Pekerjaan Sosial

Kesejahteraan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup individu, keluarga maupun masyarakat. Selain itu, kesejahteraan sosial mampu untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah yang dihadapi klien. Menurut Fahrudin (2014:10) tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yaitu:

1. Pemeliharaan sistem, pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi dan makna dan tujuan hidup.
2. Pengawasan sistem, melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi; mengintensifkan fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, (re) sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada

bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku misalnya kelompok remaja dan kelompok lain dalam masyarakat.

3. Perubahan sistem, mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat menurut Fahrudin (2014:12) Dalam mengadakan perubahan itu, sistem kesejahteraan sosial merupakan instrumen untuk menyingkahkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan; pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil; dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula.

1.2.3. Fokus Pekerjaan Sosial

Fokus utama dalam pekerjaan sosial yaitu untuk meningkatkan keberfungsian sosial. Keberfungsian sosial adalah konsep yang memiliki signifikansi penting dalam bidang pekerjaan sosial. Pada dasarnya, keberfungsian sosial dapat diartikan sebagai kemampuan individu, keluarga, atau masyarakat untuk memainkan peran sosial yang ada di lingkungannya. Konsep ini merepresentasikan nilai klien yang merupakan subjek dari semua proses dan aktivitas hidupnya; bahwa klien memiliki keterampilan dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pendampingan; bahwa klien memiliki atau dapat mengakses, menggunakan, dan mobilisasi aset dan sumber daya di sekitar mereka (Wibhawa *et al.*,2015).

Pekerjaan sosial berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk mencapai keberfungsian sosial. Konsep keberfungsian sosial tersebut berkaitan erat dengan kesejahteraan sosial. Dikutip dari (Fahrudin,2014 bahwa keberfungsian sosial yaitu:

Keberfungsian sosial merujuk pada cara-cara individu-individu maupun kolektivitas seperti perkumpulan, komunitas dan sebagainya dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kehidupannya dan memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa individu dan kelompok masyarakat mampu memenuhi tugasnya untuk memenuhi kebutuhan guna meningkatkan kualitas hidup dan keberfungsian sosial.

1.2.4. Peran Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial melibatkan tindakan yang dilakukan oleh pekerja sosial dengan tujuan untuk mengatasi masalah dan meningkatkan fungsi sosial individu. Menurut (Wibhawa *et al.*,2015), peran yang dimainkan oleh pekerjaan sosial dalam masyarakat, Lembaga, atau panti sosial akan bervariasi tergantung pada jenis masalah yang dihadapi. Pernyataan tersebut dipertegas dan diperkuat oleh (peranan yang ditampilkan pekerja sosial, yaitu:

1. Peran sebagai perantara (*broker*), pekerja sosial bekerja sebagai penghubung antara klien dengan sistem sumber di lembaga, lembaga layanan dukungan material dan moral lembaga sosial.
2. Peran sebagai pemungkin (*enabler*), pekerja sosial berusaha untuk memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan klien atau penerima layanan tidak terhalang dengan upaya yang dilakukan dalam pekerjaan sosial.
3. Peran sebagai penghubung (*mediator*), pekerja sosial bertindak untuk mencari kesepakatan, meningkatkan rekonsiliasi berbagai perbedaan, untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan, serta untuk berinvestasi pada bagian-bagian

yang sedang konflik, termasuk didalamnya membicarakan segala persoalan dengan cara kompromi dan persuasif.

4. Peran sebagai advokasi (*advocator*), pekerja sosial bertindak sebagai juru bicara klien, memaparkan dan berargumentasi tentang masalah klien jika diperlukan, membela kepentingan korban untuk menjamin sistem sumber, memberikan pelayanan yang dibutuhkan atau merubah kebijakan sistem yang tidak responsif terhadap kepentingan korban.
5. Peran sebagai perunding (*confree*), yaitu kolaborasi antara pekerja sosial dan klien, peran ini melibatkan kerjasama dalam mencari informasi dan memberikan pengawasan terhadap korban.
6. Peran sebagai pelindung (*guardian*), pekerja sosial memiliki peran untuk melindungi atau menjaga klien serta individu yang beresiko tinggi dalam kehidupan sosial.
7. peran sebagai fasilitasi (*facilitator*), pekerja sosial bertindak sebagai fasilitasi yang dilakukan guna membantu korban berpartisipasi, berkontribusi, mengikuti keterampilan baru dan menyimpulkan apa yang telah dicapai oleh korban.
8. Peran sebagai inisiator (*inisiator*), pekerja sosial berupaya dalam memberikan perhatian kepada isu-isu seperti masalah-masalah korban yang ada di badan /lembaga/panti sosial, dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan.
9. Peran sebagai negosiator (*negotiator*), ditujukan pada para klien yang mengalami konflik dari mencari penyelesaiannya dengan kompromi sehingga tercapai kesepakatan di antara kedua belah pihak.

1.2.5. Kode Etik Pekerjaan Sosial

Kode etik merupakan salah satu unsur sebuah profesi. Oleh karena itu, kode etik menjadi sebuah keharusan dalam pedoman perilaku. Sebagai pedoman perilaku, kode etik dalam pekerjaan sosial berisikan mengenai tugas, tanggung jawab serta peran pekerja sosial yang mengatur antara hubungan profesinya dengan klien, teman sejawat, rekan profesi lain, lembaga tempat bekerja dan juga masyarakat.

Dikutip dari (Wuryantari *et al.*,2018), tujuan dirumuskannya kode etik yaitu:

1. Untuk melindungi anggota organisasi dalam menghadapi persaingan praktik profesi;
2. Untuk mengembangkan tugas profesi sesuai dengan kepentingan masyarakat;
3. Untuk merangsang pengembangan kualifikasi Pendidikan dan praktik;
4. Untuk menjalin hubungan antara anggota profesi satu sama lain serta menjaga nama baik profesi;
5. Untuk membentuk ikatan yang kuat antara seluruh anggota dan melindungi profesi terhadap perlakuan norma hukum.

Sementara fungsi kode etik profesi yaitu:

Sebagai pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan;

1. Untuk mencegah adanya campur tangan dari pihak luar dari organisasi profesi terkait etika dalam keanggotaan sebuah profesi, etika profesi sangat dibutuhkan sebagai penyeimbang sekaligus pengawal proses professional;

2. Sebagai sarana dan kontrol sosial bagi masyarakat atau sebuah profesi.

Berdasarkan tujuan dan fungsi di atas, maka setiap profesi termasuk pekerja sosial harus memiliki kode etik sebagai pedoman dan juga pengawasan dalam melaksanakan praktik atau kegiatan yang berkaitan dengan profesi tersebut. Kode etik profesi hanya berlaku untuk profesi tersebut, sebagai contoh kode etik profesi pekerjaan sosial hanya dapat berlaku serta mengatur pekerja sosial yang tergabung dalam organisasi profesi pekerjaan sosial.

2.3. Konsep Tentang Organisasi Pelayanan Sosial

Human Service Organizations (HSO) merupakan suatu wadah yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya. Untuk mempermudah proses pelayanan, sejumlah program disusun secara sistematis sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta tepat sasaran. Dalam melaksanakan programnya, setiap organisasi dihadapkan pada fungsi-fungsi manajemen yang akan mengarahkan program agar sesuai dengan tujuan awal. Berbeda dengan organisasi pada umumnya, HSO masih memiliki kendala dalam melaksanakan fungsi manajemen, hal ini dapat disebabkan karena organisasi pelayanan sosial sampai saat ini masih cenderung mengarah pada *charity* serta tidak berlandaskan keuntungan (*non profit oriented*). Keadaan tersebut memungkinkan adanya pengaruh yang cukup besar dalam proses pelayanan kepada masyarakat. (Sintaningrum, 2011)

2.3.1. Pengertian Organisasi Pelayanan Sosial

Human Service Organization (HSO) atau organisasi pelayanan sosial adalah organisasi yang berfokus pada penyediaan pelayanan bagi manusia.

Organisasi ini membawa misi sosial untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atas dasar nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, kedermawanan dan kebersamaan yang tabu berbicara keuntungan materi. Sebagai organisasi pelayanan, di dalam HSO juga ada praktik-praktik ekonomi yang tentunya bukan sebagai utama dalam aktivitas organisasi dan bukan menjadi prioritas bagi HSO. Ciri khas dari organisasi ini adalah sifat kerelawanannya yang kental, dimana istilah (*voluntary*) menunjuk pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan bebas. Organisasi-organisasi kerelawanan (*voluntary organizations*) menggerakkan sumber-sumber dan kekuatan-kekuatan sosial melalui mekanisme dengan saling berbagi nilai dan harapan (Lendryono,2017).

2.3.2. Tugas dan Fungsi Organisasi Pelayanan Sosial

Tugas dari organisasi pelayanan sosial adalah melaksanakan usaha kesejahteraan sosial atau memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat yang menyandang masalah sosial atau sebagai "*Human Service Organization*". Untuk mengadakan perubahan-perubahan sikap dan tingkah laku serta meningkatkan kemampuan klien agar dapat memecahkan masalah yang dihadapi dan melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh HSO ditujukan untuk mewujudkan, memelihara, memberi, memulihkan dan mengembangkan usaha kesejahteraan sosial bagi para penyandang masalah sosial.(Soemardhi H.S, 1996:38).

Untuk Untuk melaksanakan tugas seperti disebutkan di atas, organisasi sosial mempunyai berbagai fungsi. Adapun fungsi organisasi sosial terutama dalam

rangka ikut membantu pemerintah atau berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan sosial dalam bidang kesejahteraan sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi organisasi sosial yang bergerak dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang mengarah pada usaha kesejahteraan sosial yang bersifat pencegahan atau preventif dan pengembangan atau promotif dan perubahan-perubahan sosial yang terarah dan terencana dengan sasaran garapannya yaitu potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial, keluarga dan lingkungan sosial.
2. Fungsi organisasi sosial yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial untuk terciptanya kondisi sosial dari sasaran garapan penyandang sosial atau klien agar dapat memiliki kembali dari rasa harga diri dan kepercayaan diri sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, dengan usaha kesejahteraan sosial yang bersifat preventif, rehabilitatif, sosialisasi dan bantuan sosial.

Fungsi organisasi sosial dalam rangka melaksanakan tugasnya tidak akan terlepas dari upaya untuk menggali dan menghimpun potensi dan sumber dana masyarakat serta partisipasinya. Bahkan bagaimana HSO tersebut dapat berkolaborasi dengan *stakeholder* lainnya untuk menciptakan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. selama ini fungsi yang dilakukan antara pemerintah, swasta dan masyarakat (yang didalamnya adalah HSO) masih berjalan masing-masing, dan belum ada pola kolaborasi yang sinergis dalam memberikan pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2.3.3. Hubungan *Human Service Organization* dalam pemenuhan

Kebutuhan

Beberapa jenis organisasi, baik organisasi *public*, *nonprofit*, atau untuk profit, selalu berkomitmen dan bekerjasama dengan organisasi dan arena lainnya (kelompok, komunitas, dan pemerintah lokal). Afiliasi terjadi dapat disebabkan oleh kesamaan ideologi, sistem, nilai maupun kelompok masyarakat. Afiliasi ini terjadi sangat spesifik dan lebih formal, sebagai contoh, organisasi publik memberikan mandat kepada kelompok-kelompok masyarakat untuk memberikan pelayanan, dan kepada kelompok kepentingan yang dapat mengadvokasi terhadap kebijakan sosial yang akan diciptakan. Organisasi nonprofit akan terlibat dalam mengadvokasi kelompok yang membutuhkan pelayanan seperti orang-orang yang tidak memiliki rumah. Organisasi *for profit* dengan komitmen untuk tanggung jawab sosial akan berkontribusi dalam pemberian pelayanan dengan mendonasikan sebagian profitnya kepada organisasi *charity* yang keduanya akan membentuk afiliasi dalam berbagai alasan seperti alam hubungan religi, hokum, ekonomi dan atau alasan-alasan politik.

O'connor (2009:14), menyebutkan bahwa dalam hubungan eksternal organisasi dapat diilustrasikan dalam 4 bentuk, yaitu: (1) Asosiasi, (2) *ideological community*, (3) *franchising*, (4) *host relationship*. Namun kategori ini tidak menjadi kategori mutlak dalam melihat hubungan antar organisasi, bentuk hubungan organisasi banyak yang blur, sebab organisasi memiliki jenis/pola hubungan yang berbeda-beda dan memiliki banyak hubungan yang sulit untuk dipetakan.

1. Asosiasi

menyebutkan asosiasi *volunteer* adalah kelompok orang yang menggambarkan batas antara diri mereka sendiri dengan orang lain yang bersama-sama untuk melihat dan mengatasi masalah-masalah orang, dan melakukan 'sesuatu'. Definisi ini terdengar sama dengan definisi mengenai organisasi yang dilontarkan oleh O'Connor yaitu suatu struktur, partisipan, dan tujuan. Perbedaannya pada batas antara organisasi formal yaitu organisasi yang didirikan berdasarkan landasan hukum dan disetujui oleh lembaga hukum/pemerintah.

2. *Ideological Communities*

Relasi dengan *ideological communities* mungkin lebih rendah bentuk kelembagaannya, tetapi mereka menggabungkan identitas budaya pada organisasi dan menjadi alasan organisasi tersebut ada. Religi atau masyarakat religi berafiliasi dengan pelayanan sosial atau masyarakat memahami bahwa organisasi tersebut berafiliasi dengan masyarakat religi tertentu. Secara tipikal organisasi ini dan tidak sama dengan organisasi *nonprofit*, dan memiliki nama yang mengafiliasi pada religi tertentu.

3. *Franchise/Waralaba*

Banyak lembaga perwakilan dari organisasi internasional regional, nasional, atau bahkan lokal. Oster mendefinisikan hubungan seperti waralaba diantara HSO lokal sesuai dengan ciri-ciri sebagai berikut: "(1) Menjadi *franchiser transfer* untuk para pengguna waralaba dengan hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang atau menjual produk tertentu. Seringkali meskipun tidak selalu, hak ini diberikan atas suatu wilayah tertentu. (2) Sebagai gantinya,

franchisee (pengguna waralaba) membayar kepada pemilik waralaba dan mungkin harus setuju untuk membeli persediaan atau bahan baru dari waralaba tersebut. (3) *franchisor* (pemilik waralaba) memberikan bantuan beberapa *franchisee*, biasanya di permasalahan teknis, masalah operasi, dan penerapan kontrol dalam pengoperasian. (4) Setiap sisa keuntungan dan kerugian dari usaha diberikan kepada *franchisee*” yang berarti dapat masuk ke dalam penyediaan layanan yang lebih (Oster,1992:224).

4. Hubungan *Host*

Layanan manusia dapat disampaikan oleh departemen, program, atau individual terletak di dalam organisasi induk. Organisasi ini biasanya lembaga besar yang memberikan layanan manusia atau mempekerjakan profesional membantu sebagai bagian dari apa yang mereka lakukan, tapi yang tujuan utamanya bukan pelayanan manusia. Oleh karena itu, organisasi induk bisa sistem pelayanan kesehatan, pengaturan sekolah, militer, perusahaan komersial, atau organisasi lain di mana suatu unit atau komponen memberikan pelayanan manusia. Dalam organisasi tuan rumah, praktisi dipandang sebagai tamu kelembagaan (Auslander, 1996:15). Klien biasanya tidak datang untuk tujuan mendapatkan pelayanan manusia karena itu bukanlah fungsi utama organisasi. Namun, dalam proses penyediaan apa yang klien butuhkan, organisasi induk mungkin terlibat praktisi atau unit pelayanan sosial untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan.

2.4. Konsep Tentang Organisasi Pelayanan Sosial Berbasis Keagamaan

Sebelum abad ke-16 pada Mulanya, usaha-usaha kesejahteraan sosial dilakukan oleh kelompok orang yang menggunakan basis nilai sosial, yang disebut dengan usaha kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial berbasis *charity* atau belas kasihan. Kemudian perkembangan berikutnya, suatu usaha kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial berbasis keagamaan. Usaha-usaha kesejahteraan yang dilakukan pada umumnya merupakan pelayanan sosial yang dilandasi nilai-nilai agama tertentu. Pekerjaan sosial atau usaha kesejahteraan sosial ini nilai dasarnya bersifat amal.

Harapan dan usaha kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial ini, bagi mereka yang mengerjakannya berharap mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kelak di kemudian hari. Amal kebaikan yang dilakukan dengan motif agar mereka mendapat surga, sebagaimana diperintahkan dalam kitab sucinya masing-masing agama.

Sebagaimana yang dituliskan Canda dan Furman dalam bukunya, keberagaman agama dalam praktik pekerjaan sosial (*spiritual diversity in social work practice: the hearth of helping*), (buddha, hindu, islam, konghucu, Kristen, dan yahudi) bahwa setiap agama memiliki kepercayaan dan nilai dasar yang berimplikasi pada penerapan atau praktik pekerjaan sosial atau usaha kesejahteraan sosial yang mereka lakukan.

2.4.1. Pengertian Organisasi Pelayanan Sosial Berbasis Keagamaan

Organisasi pelayanan sosial dengan basis agama adalah organisasi yang menjalankan aktivitas organisasinya didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama atau

disebut sebagai *Faith Based Organization (FBO)*. sama halnya dengan HSO, FBO meskipun berdasar pada nilai ajaran agama, dalam aktivitas organisasinya juga terdapat praktik-praktik ekonomi yang dijadikan sebagai penopang keberlanjutan organisasi.

Pemikiran Emile Durkheim bahwa memahami fenomena keagamaan bukanlah sekedar doktrin-doktrin tentang masalah-masalah supernatural, agama bukan pula sekedar ajaran yang terdapat pada manuskrip, melainkan sebuah gejala sosial yang merefleksikan kohesivitas dan solidaritas sosial masyarakat. Konsep-konsep moralitas dibangun sebagai sebuah kesadaran kolektif dan sebagai bentuk ‘disiplin sosial’ yang mengikat sebuah kelompok masyarakat secara kolektif. Dalam konteks ini, sebuah kehidupan etis atau mungkin ‘*religious*’, sangat tergantung pada kohesi dan solidaritas antar individu (Latief, 2013; 175) dalam (Lendriyono,2017). Dalam konteks organisasi, pemikiran ini dapat dipahami bahwa bergesernya penguatan arah orientasi organisasi yang didasari nilai-nilai ajaran agama, diperlukan adanya dukungan sosial dan untuk kepentingan kolektif. Dari konteks pemikiran inilah kemudian berkembang pemikiran tentang peran organisasi keagamaan dalam pelayanan kemanusiaan.

Kepedulian organisasi berbasis keagamaan pada isu kemanusiaan dapat dijelaskan secara sosiologis maupun historis. Secara sosiologis, perspektif Individuo. Globalisme sebagaimana *Raphael Liogier*, memandang kalau ada tiga kekuatan yang saling mendukung dalam FBO. yaitu kekuatan kultus spiritual, pertumbuhan pribadi (*le narcissisme eclate*), dan kepedulian pada keseluruhan alam semesta. Tiga kekuatan ini bermain dalam diri individu-individu yang terlibat

dalam organisasi berbasis keyakinan (Benthall, 2008:94) dalam (Lendriyono,2017).. Ini yang membedakan organisasi berbasis keyakinan modern dengan lembaga misionaris yang hanya bertumpu pada kekuatan kultus spiritual. Selain itu, organisasi berbasis keyakinan dapat dibedakan dengan organisasi berbasis sekuler dengan promosi yang dibawakan. Organisasi berbasis sekuler mendorong konsumen untuk membangun modal, sementara organisasi berbasis keyakinan mendorong konsumen untuk membangun kesejahteraan seketika lewat keyakinan.

2.4.2. Konsep Pelayanan Sosial dalam *Faith Base Organization*

Motivasi dasar dari FBO adalah ajaran agama yang diyakini. FBO sering menekankan kalau agama yang mereka usung merupakan jalan untuk memecahkan masalah sosial yang dihadapi. Pelayanan sosial yang diberikan FBO dapat bersifat kas ataupun modal sosial. Dalam pelayanan bersifat kas, akan lebih baik jika FBO bekerjasama dengan pemerintah sehingga tidak muncul kecurigaan kalau FBO berusaha merekrut pemeluk agama dari masyarakat yang menderita dengan semata menawarkan bantuan ekonomi atau makanan. Dalam konteks modal sosial, FBO dipandang lebih baik bekerja tanpa campur tangan pemerintah khususnya dalam melayani masyarakat miskin, minoritas atau mantan narapidana (Cole, 2002:571) dalam (Lendriyono,2017). Hal ini karena ketiga golongan tersebut telah memiliki ketidakpercayaan pada pemerintah dan lebih menyenangi sisi independen dari FBO yang langsung menghubungkan mereka dengan otoritas tertinggi yaitu Tuhan. Dalam beberapa penelitian telah ditemukan kalau pasokan dana dari pemerintah pada FBO memberikan dampak bergesernya orientasi FBO dari orientasi agama

menjadi lebih sekuler dan meningkatkan beban kerja dan birokrasi FBO (Reese dan Shields, 1999:171) dalam (Lendriyono,2017).

Masalah ketika FBO terlepas dari pemerintah kemudian adalah niat oportunistik sekular, khususnya pemilik modal besar yang bergerak dalam ekonomi. FBO yang tidak memperoleh dana dari pemerintah dapat memperoleh dana dari swasta tunggal. Yayasan tertentu misalnya, dapat dengan sengaja membuat FBO untuk memperbaiki citra buruk perusahaan atau mempromosikan perusahaan agar memperoleh kepercayaan publik, walaupun pada gilirannya melakukan tindakan yang melanggar prinsip sosial kemanusiaan pada level atas seperti penyuapan atau pengurangan pajak (Cole, 2002:576) dalam (Lendriyono,2017).. Bahkan ketika sumber dana tidak dapat diperoleh dari pemerintah atau lembaga swasta tunggal, FBO masih rentan dengan penyelewengan tujuan dengan lebih menekankan pada pengumpulan dan penumpukan sumbangan ketimbang pemanfaatan sumbangan yang ada untuk peningkatan modal sosial masyarakat yang dilayani Hal ini pada gilirannya memberi masalah dana bagi FBO untuk beroperasi dengan efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan sosial berbasis keagamaan. Pada gilirannya, secara umum FBO beroperasi dengan sumber dana dari yayasan keagamaan atau sumbangan khusus (Reese dan Shields, 1999:191) dalam (Lendriyono,2017).

Walaupun terdapat permasalahan dalam sumber dana, FBO telah memberikan banyak kontribusi dalam pelayanan sosial. Di AS, FBO telah terlibat pada penyediaan dukungan bagi masyarakat miskin, misalnya; program pemulihan kecanduan narkoba, pengembangan perumahan, pelatihan kerja dan wirausaha,

inkubator bisnis, dukungan konseling, dan penyedia kredit lunak (Reese dan Shields, 1999:170). Salah satu bidang pelayanan sosial yang paling efektif untuk dijalankan oleh FBO adalah pemulihan kecanduan narkoba. Korban narkoba, baik dari kelompok ateis atau teis, lebih mudah disembuhkan ketika agama digunakan dalam upaya pemulihan (de Jong dan Horn, 2008:147) dalam (Lendriyono,2017).

2.5. Konsep Tentang Pengembangan Kapasitas

Menurut (Putra,2019)Pengembangan kapasitas mengacu kepada proses dimana individu, kelompok, organisasi, kelembagaan, dan masyarakat mengembangkan kemampuannya baik secara individual maupun kolektif untuk melaksanakan fungsi mereka, menyelesaikan masalah mereka, mencapai tujuan-tujuan mereka secara mandiri. Dengan demikian yang dimaksud pengembangan kapasitas (*capacity building*) dalam meningkatkan mutu pendidikan di sini mengacu kepada proses membangun kapasitas lembaga sebagai dasar pengembangan (*capacity building*) di lembaga pendidikan yang dilakukan oleh kepala madrasah dalam menjalankan fungsi, menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan-tujuan organisasi atau dengan kata lain kemampuan lembaga dalam menjalankan pengembangan kelembagaannya.

2.5.1. Pengertian Pengembangan Kapasitas

Pengembangan kapasitas (*capacity development*) adalah sebuah pendekatan yang pada masa sekarang ini secara luas digunakan dalam pembangunan masyarakat (*community development*). Istilah pengembangan kapasitas telah digunakan sejak tahun 1990an oleh negara-negara donor untuk memperbaiki kapasitas negara partner (negara yang mendapat bantuan). Selanjutnya Milen

(2006:15) memberikan pengertian pengembangan kapasitas adalah proses dimana individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (*core function*), memecahkan permasalahan, merumuskan dan mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan dalam konteks yang lebih luas dalam cara yang berkelanjutan. Pengembangan kapasitas adalah sebuah proses untuk meningkatkan individu, kelompok, organisasi, komunitas dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan. Menurut Brown, pada jurnal Tuti Erawaty (2018) pengembangan kapasitas merupakan suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Berdasarkan pemaparan mengenai definisi dari beberapa ahli tentang pengembangan kapasitas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan kapasitas secara umum merupakan suatu proses pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki oleh individu, kelompok atau organisasi serta sistem untuk memperkuat kemampuan diri, kelompok dan organisasi sehingga mampu mempertahankan diri atau profesinya di tengah perubahan yang terjadi secara terus menerus.

2.5.2. Tujuan Pengembangan Kapasitas

Secara umum tujuan pengembangan kapasitas (*capacity building*) agar individu, organisasi maupun sistem yang ada dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari individu maupun organisasi tersebut. Jadi siapapun dapat melaksanakan upaya pengembangan kapasitas kepada siapapun

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai; individu, kelompok, organisasi formal maupun non formal, institusi pemerintah maupun swasta dapat melakukan pengembangan kapasitas sepanjang prasyaratnya disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam elaborasi tentang pelaksanaan pengembangan kapasitas ini.

Menurut Morrison bahwa peningkatan kapasitas (*Capacity Building*) adalah serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan responsifitas dari kinerja. Lebih lanjut Morrison mengatakan bahwa (*Capacity Building*) adalah pembelajaran, berawal dari mengalirnya kebutuhan untuk mengalami suatu hal, mengurangi ketidaktahuan dan ketidakpastian dalam hidup, dan mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk beradaptasi menghadapi perubahan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penjelasan tersebut menunjukkan bahwa adapun tujuan dari (*capacity building*) dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Secara umum diidentikan pada perwujudan keberlanjutan (*sustainability*) suatu sistem
2. Secara khusus ditujukan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dilihat dari aspek:
 - a. Efisiensi dalam hal waktu (*time*) dan sumber daya (*resource*) yang dibutuhkan guna mencapai suatu (*outcome*)
 - b. Efektifitas berupa kepatutan usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan.

- c. Responsifitas yakni bagaimana menyamakan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut
- d. Pembelajaran yang terindikasi pada kinerja individu, grup, organisasi dan sistem.

Jadi pengembangan kapasitas (*capacity building*) harus melibatkan seluruh elemen yang ada guna mencapai sasaran/tujuan yang telah ditetapkan.

2.5.3. Faktor Pengembangan Kapasitas

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan maupun kesuksesan program pengembangan kapasitas. Namun secara khusus Soeparto mengemukakan bahwa faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pengembangan kapasitas adalah sebagai berikut:

1. Komitmen bersama (*collective commitments*) dari seluruh aktor yang terlibat dalam sebuah organisasi sangat menentukan sejauh mana pengembangan kapasitas akan dilaksanakan ataupun disukseskan. Komitmen bersama ini merupakan modal dasar yang harus terus menerus ditumbuhkembangkan dan dipelihara secara baik oleh karena faktor ini akan menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Tanpa adanya komitmen baik dari pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah dan juga staff yang dimiliki, sangatlah mustahil mengharapkan program pengembangan kapasitas bisa berlangsung apalagi berhasil dengan baik.
2. Kepemimpinan faktor (*conducive leadership*) merupakan salah satu hal yang paling mendasar dalam mempengaruhi inisiasi dan kesuksesan program pengembangan kapasitas personal dalam kelembagaan sebuah organisasi.

Dalam konteks lingkungan organisasi publik, harus terus menerus didorong sebuah mekanisme kepemimpinan yang dinamis sebagaimana yang dilakukan oleh sektor swasta. Hal ini karena tantangan ke depan yang semakin berat dan juga realitas keterbatasan sumber daya yang dimiliki sektor publik. Kepemimpinan kondusif yang memberikan kesempatan luas pada setiap elemen organisasi dalam menyelenggarakan pengembangan kapasitas merupakan sebuah modal dasar dalam menentukan efektivitas kapasitas kelembagaan menuju realisasi tujuan organisasi yang diinginkan.

3. Reformasi peraturan. kontekstualitas politik pemerintahan daerah di Indonesia serta budaya pegawai pemerintah daerah yang selalu berlindung pada peraturan yang ada serta lain-lain faktor legal-formal prosedural merupakan hambatan yang paling serius dalam kesuksesan program pengembangan kapasitas. Oleh karena itulah, sebagai sebuah bagian dari implementasi program yang sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan maka reformasi (atau dapat dibaca penyelenggaraan peraturan yang kondusif) merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan dalam rangka menyukseskan program kapasitas ini.
4. Reformasi kelembagaan reformasi peraturan di atas tentunya merupakan salah satu bagian penting dari reformasi kelembagaan ini. Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada pengembangan iklim dan budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan program kapasitas personal dan kelembagaan menuju pada realisasi tujuan yang ingin dicapai. Reformasi kelembagaan menunjuk dua aspek penting yaitu struktural dan kultural. Kedua aspek ini harus dikelola sedemikian rupa dan menjadi aspek yang penting dan kondusif dalam

menopang program pengembangan kapasitas karena pengembangan kapasitas harus diawali pada identifikasi kapasitas yang dimiliki maka harus ada pengakuan dari personal dan lembaga tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dari kapasitas yang tersedia (*existing capacities*). Pengakuan ini penting karena kejujuran tentang kemampuan yang dimiliki merupakan setengah syarat yang harus dimiliki dalam rangka menyukseskan program pengembangan kapasitas.

2.5.4. Tingkatan Pengembangan Kapasitas

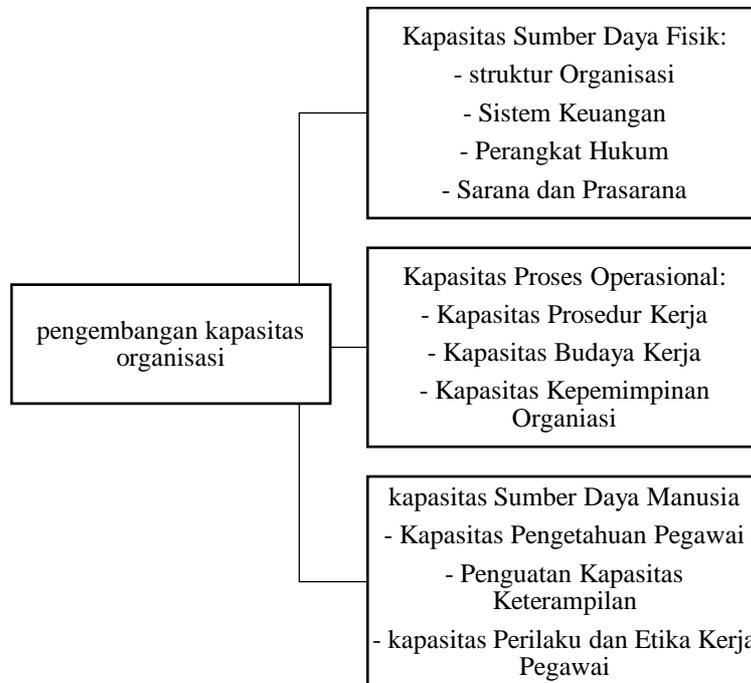
Menurut Merilee S. Grindle (1997:23) dalam (Erawaty,2018) menyebutkan *capacity building* merupakan upaya yang ditujukan untuk mengembangkan suatu strategi guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan responsivitas kinerja pemerintah. Efisiensi disini dalam hal waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai mencapai *outcome*, efisiensi berupa kepatutan usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan serta responsivitas bagaimana menyesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut. Definisi lain tentang *capacity building* organisasi yang dikemukakan oleh Morisson (2001:42) dalam (Erawaty,2018) yaitu melihat *capacity building* sebagai suatu proses untuk melaksanakan sesuatu, atau serangkaian gerakan, perubahan *multi level* di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi- organisasi dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada.

Menurut Mowbray dalam (Erawaty,2018) tingkatan *capacity building* terdiri dari:

1. Tingkatan dan dimensi Individu, adalah tingkatan dalam sistem yang paling kecil, dalam tingkatan ini. Aktivitas *capacity building* yang ditekankan ada aspek memberi pembelajaran kepada individu dalam rangka mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam ruang lingkup penciptaan peningkatan ketrampilan-ketrampilan dalam diri individu, penambahan pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat ini, peningkatan tingkah laku untuk memberikan tauladan dan motivasi
2. Tingkatan dan dimensi pengembangan kapasitas pada kelembagaan atau organisasi terdiri dari atas sumber daya organisasi, budaya organisasi, ketatalaksanaan, struktur organisasi atau sistem pengambilan keputusan.
3. Tingkatan dan dimensi pengembangan kapasitas pada sistem merupakan tingkatan yang paling tinggi dimana seluruh komponen masuk didalamnya. Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu.

Penjelasan Grindle, Momray dan Morisson dalam (Erawaty,2018) sudah cukup jelas bahwa tingkatan dari *capacity building* terdiri atas pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan.

Gambar 2. 1 Pengembangan Kapasitas Organisasi



Sumber: (Erawatiy,2018)

2.6. Konsep Tentang Lembaga Sosial

Menurut Leopold Von Weise dan Becker dalam (Latifah,2022) mendefinisikan lembaga sosial adalah jaringan proses hubungan antar manusia dan antar kelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu beserta pola-polanya yang sesuai dengan minat kepentingan individu dan kelompoknya. Peran lembaga sosial adalah mencakup pola tingkah laku atau tugas yang harus dilakukan oleh seseorang atau masyarakat dalam kondisi yang mengatur, mengarahkan dan melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang memiliki peran dalam kegiatan-kegiatan yang ada di bidang perekonomian. Fungsi utama dari lembaga

ini adalah menjaga agar kebutuhan pokok masyarakat akan dapat memenuhi secara berkelanjutan. Sedangkan Lembaga keagamaan adalah lembaga sosial yang mengatur kehidupan manusia dalam beragama, baik agama Islam, hindu, budha, Kristen, katolik dan agama lainnya. Tujuan utama dari lembaga keagamaan adalah menjaga kerukunan keagamaan seperti sarana pembantu pencarian identitas moral, sebagai sarana peningkatan solidaritas kelompok, kohesi sosial, dan keramahan dalam bergaul dan lainlainya.

2.6.1. Pengertian Lembaga Sosial

Lembaga sosial menurut (Fahrudin, 2014) menyatakan bahwa Lembaga sosial merupakan perbuatan, cita-cita, sikap dan perlengkapan kebudayaan yang mempunyai sikap kekal serta bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Lembaga berfungsi agar ada keteraturan dan integrasi di dalam masyarakat. Begitupun menurut Soerjono Soekanto, Lembaga sosial atau pranata sosial adalah himpunan norma dari segala Tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.

Dari uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa lembaga sosial berkaitan dengan dengan seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung, dan saling mempengaruhi; seperangkat norma yang dapat hidup; seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga negara masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur.

Berdasarkan pengertian- pengertian tersebut, Lembaga sosial memiliki ciri-ciri antara lain adanya tujuan, dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama, tertulis atau tidak tertulis, diambil dari nilai-nilai adat istiadat yang berlaku

di masyarakat, adanya prasarana seperti bangunan dan lambang tertentu. Di dalam lembaga sosial akan ditemukan unsur budaya dan unsur struktural, yaitu berupa norma dan peranan sosial. Lembaga sosial dapat dikatakan sebagai suatu adat kebiasaan dalam kehidupan bersama yang mempunyai sanksi yang sistematis dan dibentuk oleh kewibawaan masyarakat.

2.6.2. Klasifikasi Lembaga Sosial

Tipe-tipe Lembaga sosial menurut (Mudiyarto,2007) dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut pandang. Menurut Gillin dan Gillin dalam (Mudiyarto,2007). Lembaga sosial dapat di klasifikasikan antara lain sebagai berikut.

1. *Creative institutions* dan *enacted institutions* yang merupakan klasifikasi dari sudut perkembangannya. *Creative institutions* disebut juga Lembaga-lembaga paling primer dan merupakan lembaga yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contohnya, hak milik, perkawinan, agama dan seterusnya. Adapun *enacted institutions* dengan sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya Lembaga utang piutang, Lembaga perdagangan dan lembaga-lembaga pendidikan, yang semuanya berakar pada kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat.
2. Dilihat dari sudut nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat, timbul klasifikasi Lembaga sosial berdasarkan *basic institutions* dan *subsidiary institutions*. *Basic institutions* dianggap sebagai Lembaga sosial yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Di dalam masyarakat Indonesia, keluarga , sekolah-sekolah, negara dan lain sebagainya dianggap sebagai *basic institutions* (Lembaga yang pokok). Adapun *subsidiary*

institutions dianggap lembaga yang kurang penting. Misalnya, kegiatan rekreasi. Ukuran yang dipakai untuk menentukan suatu Lembaga sosial penting atau tidak penting, setiap kelompok masyarakat memiliki penilaian yang berbeda.

3. Dari sudut penerimaan masyarakat, Lembaga sosial dapat dibedakan menjadi *social sanctioned institutions (approved)* dan *unsanctioned institutions*. *Social sanctioned institutions (approved)* adalah Lembaga-lembaga yang diterima oleh masyarakat. Misalnya sekolah, atau perusahaan dagang. Adapun *unsanctioned institutions* merupakan yang ditolak keberadaannya oleh masyarakat walaupun kadang-kadang masyarakat itu sendiri tidak berhasil memberantasnya. Misalnya, kelompok penjahat, kelompok pemeras, atau pencoleng.
4. Perbedaan antara *general institutions* dan *restricted institutions* timbul jika klasifikasi tersebut didasarkan pada faktor penyebarannya, misalnya agama. Agama merupakan suatu *general institutions* karena hampir dikenal oleh seluruh masyarakat dunia. Adapun agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan dan lainnya merupakan *restricted institutions* karena dianut oleh masyarakat-masyarakat tertentu di dunia. Misalnya, agama Islam banyak dianut oleh masyarakat di Timur Tengah, dan Indonesia, Malaysia. Adapun di Amerika dan Eropa mayoritas penduduk memeluk agama Kristen.
5. Menurut fungsinya, Lembaga sosial dibedakan atas *operative institutions* dan *regulative institutions*. *Operative institutions* berfungsi sebagai Lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlakukan untuk mencapai tujuan

Lembaga yang bersangkutan, seperti Lembaga industrialisasi. Adapun *regulative institutions* bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak Lembaga itu sendiri. Suatu contoh adalah lembaga-lembaga hukum, seperti kejaksaan, atau pengadilan.

Klasifikasi Lembaga-lembaga sosial tersebut menunjukkan bahwa didalam setiap masyarakat akan dijumpai bermacam-macam Lembaga sosial. Setiap masyarakat mempunyai sistem nilai yang menentukan Lembaga sosial manakah yang dianggap sebagai pusat dan yang dianggap berada di atas Lembaga-lembaga sosial lainnya.

Pada masyarakat totaliter, misalnya, negara dianggap sebagai Lembaga sosial pokok yang membawakan Lembaga-lembaga lainnya seperti keluarga, hak milik, perusahaan, atau sekolah. Akan tetapi, dalam setiap masyarakat akan dijumpai pola-pola yang mengatur hubungan antar Lembaga sosial tersebut. Sistem pola hubungan-hubungan tersebut lazimnya disebut *institutional configuration*.

Masyarakat yang homogen dan tradisional mempunyai pola hubungan yang cenderung bersifat statis. Pada masyarakat yang sudah kompleks dan terbuka bagi perubahan sosial budaya, sistem tersebut sering sekali mengalami kegoncangan-kegoncangan. Hal tersebut disebabkan oleh masuknya hal-hal yang baru.

2.6.3. Peran dan Fungsi Lembaga Sosial

Setiap hal memiliki peran dan fungsinya, dalam (Mudiyarto,2007). Demikian pula dengan keberadaan Lembaga-lembaga sosial. Peran dan fungsi lembaga sosial sangat erat dengan orientasinya. Beberapa Lembaga sosial yang tumbuh dan sangat dikenal dalam kehidupan sosial adalah sebagai berikut.

1. Lembaga keluarga

Pengertian luas dari keluarga adalah kekerabatan yang dibentuk atas dasar perkawinan dan hubungan darah. Kekerabatan yang berasal dari satu keturunan dan hubungan darah merupakan penelusuran leluhur seseorang, baik melalui garis ayah maupun ibu ataupun keduanya. Hubungan kekerabatan seperti ini dikenal sebagai keluarga luas (*extended family*) yaitu ikatan keluarga dalam satu keturunan yang terdiri atas kakek, nenek, ipar, paman, anak, cucu, dan sebagainya. Kekerabatan ini ada yang memiliki norma atau solidaritas ke dalam yang kuat sehingga ikatan kekerabatan menjadi erat sekali. Adapun kekerabatan atas dasar perkawinan merupakan proses masuknya seseorang dalam satu ikatan keluarga, baik masuk menjadi keluarga laki-laki maupun keluarga Wanita atau keduanya.

Keluarga tidak hanya berfungsi sebagai satuan sosial yang menyelenggarakan sosialisasi, tetapi juga sebagai satuan yang memberikan kepuasan emosional dan rangsangan perasaan para anggotanya. Keluarga merupakan Lembaga atau pranata yang besar pengaruhnya terhadap sosialisasi anak. Kondisi demikian menyebabkan pentingnya peranan keluarga yaitu sebagai berikut.

- a. Keluarga batih merupakan kelompok kecil anggota-anggotanya berinteraksi langsung secara tetap dan berkesenimanbungan. Dengan demikian, perkembangan anak dapat diikuti secara seksama oleh kedua orangtuanya, dan kepribadian anakpun dapat lebih mudah dibentuk dalam tahap sosialisasi primer. Perhatian yang besar orangtua terhadap anak-anaknya dapat mendorong mereka berprestasi di sekolah.

- b. Orangtua yang berpandangan maju memiliki motivasi yang kuat dalam mendidik anaknya. Anak diharapkan dapat memiliki status dan peran yang baik di masyarakat.

Setiap kehidupan yang terjadi di masyarakat, terutama keluarga sebagai Lembaga terkecil, struktur kelebangaannya akan berkembang sesuai dengan keinginan masyarakat untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Adapun tugas dan fungsi keluarga adalah sebagai berikut.

- a. Fungsi melanjutkan keturunan atau reproduksi

Pada awal terbinanya keluarga, tentu saja banyak yang mendambakan kehadiran anak, sebagai hasil perkawinan yang sah dari hubungan suami dan istri.

- b. Fungsi afeksi

Fungsi afeksi ini dapat berupa tatapan mata, ucapan-ucapan mesra, sentuhan-sentuhan halus, yang semuanya akan merangsang anak dalam membentuk kepribadiannya. Dengan demikian fungsi afeksi harus dimulai dari lingkungan keluarga karena orangtua langsung berhubungan terus-menerus dengan anaknya sehingga anak akan menerima komunikasi dari orangtuanya dan merasakan adanya rangsangan rasa kasih sayang yang mereka perlukan.

- c. Fungsi sosialisasi

Keluarga merupakan sistem yang menyelenggarakan sosialisasi terhadap calon-calon warga masyarakat baru. Seseorang yang dilahirkan di suatu keluarga melalui suatu proses penyerapan unsur-unsur budaya yang mengatur masyarakat bersangkutan. Calon warga masyarakat baru dipersiapkan oleh orangtuanya,

kemudian oleh orang lain dan Lembaga Pendidikan sekolah untuk dapat menjalankan peranan dalam kehidupan bermasyarakat di bidang ekonomi, agama, atau politik sesuai dengan kebutuhan setiap anggota masyarakat. Keluarga merupakan tempat awal terbiasanya sosialisasi bagi seseorang.

2. Lembaga ekonomi

Menelaah ekonomi melalui sosiologi dapat dikaji dengan pendekatan struktural, yakni melihat relasi atau hubungan antara subjek dan objek atau komponen-komponen yang merupakan bagian dari suatu sistem pemenuhan kebutuhan. Struktur adalah pola dari berbagai sistem relasi. Ekonomi akan melibatkan berbagai sistem yang terdapat didalamnya, termasuk hubungan antarmanusia yang terlibat dalam proses ekonomi. Dengan demikian, unsur manusia sebagai unsur sosial akan selalu terlibat dalam suatu proses produksi, distribusi serta konsumsi barang dan jasa. Hal ini akan menjadi suatu permasalahan struktural dalam sosial-ekonomi karena perekonomian masyarakat akan melibatkan hubungan antarmanusia, baik sebagai konsumen maupun produsen, yang juga merupakan relasi sosial sehingga masalah sosial ekonomi mencakup antara lain sebagai berikut.

- a. Pola relasi antara manusia sebagai subjek dan sumber kemakmuran ekonomi, seperti alat produksi, fasilitas dari negara, perbankan, dan kenyataan sosial. Adapun masalah structural dalam ekonomi akan berkisar pada bagi hasil, sewa-menyewa, keuntungan pinjaman ke bank, dan lain-lain.
- b. Pola relasi antara manusia sebagai subjek dan hasil produksi, meliputi masalah distribusi hasil, masalah penghasilan yang didapat dengan prestasi yang dicapai.

- c. Pola relasi antarsubjek sebagai komponen sosial ekonomi sehingga merupakan mata rantai dalam sistem produksi.

Dengan demikian, proses produksi, distribusi, ataupun konsumsi barang dan jasa akan selalu melibatkan subjek atau pihak lain sehingga Lembaga ekonomi tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek pendukungnya, yaitu manusia yang terlibat didalamnya.

2 Lembaga politik

Lembaga politik adalah suatu pola tingkah laku manusia yang sudah mapan, yang terdiri atas interaksi sosial dan tersusun di dalam suatu kerangka nilai yang sesuai. Pranata politik dibentuk konstitusi dokumen-dokumen dasar atau beberapa kebiasaan sehingga terbentuk struktur dan proses formal legislative, eksekutif, administratif, dan hukum. Lembaga politik menentukan hasil-hasil dalam proses politik dengan penetapan batas-batas kekuasaan, yang digunakan di dalamnya dengan memengaruhi isi dan arah komunikasi politik.

Lembaga politik memiliki fungsi untuk memelihara ketertiban dalam negeri dan menjaga keamanan luar negeri, mengusahakan kesejahteraan umum, dan mengatur proses politik. Lembaga politik bertujuan untuk menegakan ketertiban dan keadilan dalam sebuah negara. Oleh karena itu, dalam menjalankan sebuah negara diperlukan kekuasaan dari pemerintah yang dapat melindungi kepentingan rakyat dan kesejahteraan umum dari berbagai tekanan dan rongrongan pihak yang ingin mengacaukan kehidupan masyarakat. Rakyat perlu mendapatkan rasa aman dan tentram agar tercipta masyarakat yang adil dan Makmur. Selain itu, perlu adanya kesadaran politik dari setiap warga negara tidak hanya di bentuk oleh

pemerintah, tetapi oleh seluruh warga negara menyadari kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kepentingan negara tidak sama dengan kepentingan pemerintah karena negara tidak hanya dibentuk oleh pemerintah, tetapi oleh seluruh warga negara. Di sinilah pentingnya kesadaran politik, bagi negara untuk semua warga negara atau rakyat.

3 Lembaga Pendidikan

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setelah menyelesaikan Pendidikan dasar, mereka berhak melanjutkan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan, baik melalui jalur pendidikan umum, kedinasan, maupun kejuruan sesuai dengan yang tercantum dalam UU No. 2 tahun 1989. Begitu pula halnya anak yang memiliki kelainan, baik fisik maupun mental, berhak mendapatkan pendidikan luar biasa.

Pada prinsipnya, Pendidikan hampir sama dengan proses sosialisasi terhadap anak. Selain itu, Pendidikan sekolah merupakan proses sosialisasi, media transmisi pengetahuan dasar dari setiap bidang ilmu, dan mensosialisasikan kebudayaan kepada komunitas masyarakat, terutama generasi muda, dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan memiliki fungsi mempertahankan atau melestarikan sistem nilai yang berlaku. Pendidikan juga dituntut untuk dapat berperan penuh dalam mempercepat perubahan sosial. Nilai dan budaya diwariskan kepada generasi penerus, salah satunya melalui pendidikan sekolah. Warisan nilai budaya yang diwariskan dapat berupa perilaku untuk membentuk kepribadian yang bertanggung

jawab terhadap masa depan bangsa dengan tidak melepaskan diri dari nilai dan norma yang sesuai dengan identitas dan jati diri bangsa.

4 Lembaga agama

Sebagai sebuah Lembaga sosial, agama berarti sistem keyakinan dan praktik keagamaan yang penting dari masyarakat, yang telah dibakukan dan dirumuskan serta dianut secara luas dan dipandang sebagai sesuatu yang diperlukan dan benar. Asosiasi agama merupakan kelompok orang yang terorganisasi, yang secara bersama-sama menganut keyakinan dan menjalankan praktik suatu agama.

Sebagaimana lembaga-lembaga lainnya, agama juga memiliki fungsi atau peran. Peran lembaga agama di bidang sosial adalah sebagai penentu, agama menciptakan suatu ikatan bersama, baik di antara anggota-anggota beberapa masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial yang membantu mempersatukan mereka. Peran agama sebagai sosialisasi individu tumbuh menjadi dewasa. Pada saat itu, individu memerlukan suatu sistem nilai sebagai tuntunan untuk mengarahkan aktivitasnya dalam masyarakat dan berfungsi sebagai tujuan akhir pengembangan kepribadiannya. Pendidikan agama merupakan tanggung jawab dari orangtua untuk mengenalkan, memberi contoh untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah-Nya.

Adapun fungsi lembaga keagamaan menurut Bruce J. Cohen dalam (Erawaty,2018) yaitu :

1. Bantuan terhadap pencarian identitas moral;
2. Memberikan penafsiran-penafsiran untuk membantu memperjelas keadaan lingkungan fisik dan sosial seseorang.